BAB IV

PERANCANGAN

4.1 Analisa Sistem

Berdasarkan analisa yang dilakukan penulis ada beberapa kelemahan pada sistem yang sedang berjalan saat ini.

Kelemahan dari sistem yang sedang berjalan saat ini adalah ruang gerak aparat pengawasan fungsional dibatasi, yaitu hanya sebatas yang tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan yang obyeknya hanya kecamatan dan desa.

Sedangkan untuk Dinas/Instansi tingkat kabupaten bukan kewenangan Itwilkab, sehingga jika dalam dinas/instansi tersebut disinyalir terdapat penyimpangan sedangkan oleh pengawas fungsional tingkat atas tidak/belum terkaper (tidak tergarap atau belum terperiksa) maka dimintakan petunjuk langsung dari Bupati atau dikoordinasikan dengan Inspektorat Wilayah Propinsi apakah diperkenankan diperiksa oleh kabupaten atau tidak, serta sistem pengolahan data di inspektorat wilayah kabupaten yang masih menggunakan cara manual, sehingga mengurangi efektivitas kerja.

4.2 Usulan

Berdasarkan undang-undang No 22/tahun 1999 tentang pelaksanaan otonomi daerah, Lembaga Pengawas Fungsional Itwilkab

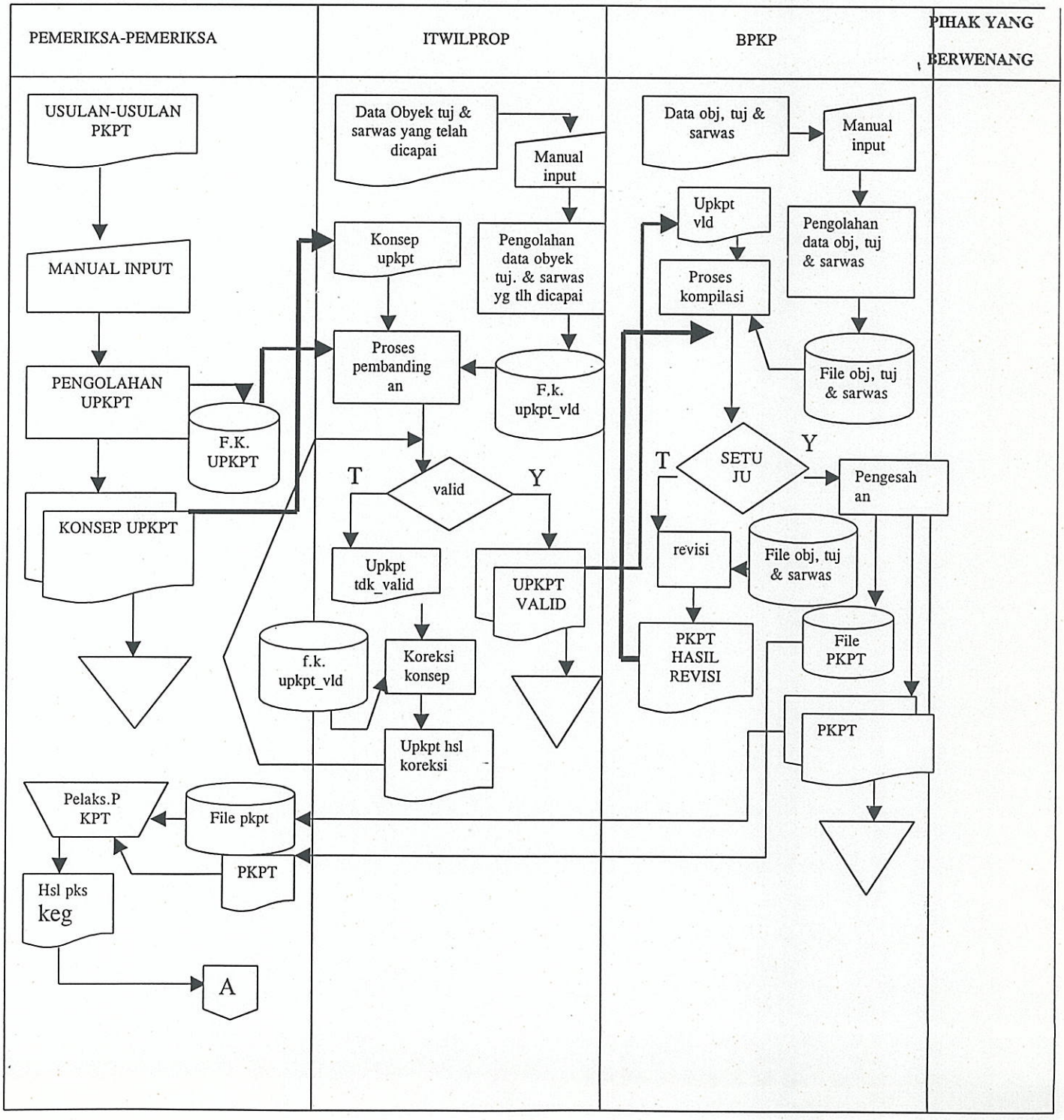
diberi kewenangan untuk mengusulkan Daftar Obyek Pemeriksaan (DOP) terhadap dinas/instansi tingkat kabupaten dengan jumlah hari pemeriksaan dan dana yang dibutuhkan disesuaikan dengan anggaran APBD.

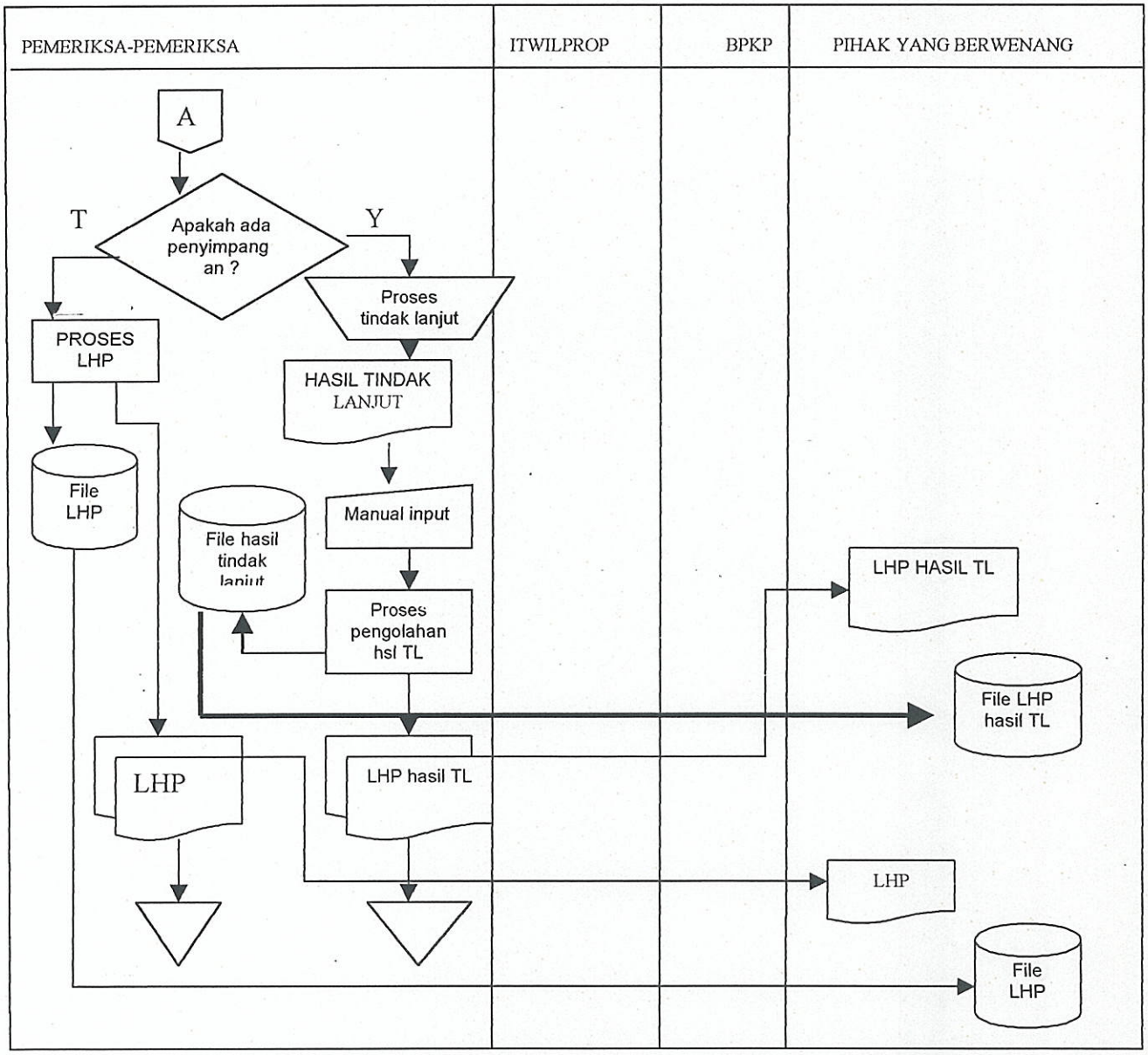
Sedangkan pada sistem yang sedang berjalan saat ini agar diadakan perubahan terhadap proses pemeriksaan yang biasanya obyeknya ditetapkan oleh pusat dimana Itwilkab tidak bisa memeriksa kedinasan, sekalipun dapat dengan waktu yang terbatas dan anggaran yang telah ditentukan.

Seharusnya Inspektorat wilayah menentukan sendiri obyeknya secara bebas tanpa harus menunggu ketentuan ataupun surat perintah langsung dari pusat dan dapat memeriksa kedinasan tanpa batas waktu yang telah ditetapkan oleh pusat. karena menurut anggapan penulis tentunya pemeriksa-pemeriksa tiap-tiap daerah lebih mengetahui tentang keadaan daerahnya masing-masing, baik itu kelemahan dan penyimpangan yang terjadi. Serta dalam proses tindak lanjut terhadap kasus yang mereka temukan tidak perlu meminta surat perintah dari atasan untuk menindaklanjuti temuan mereka.

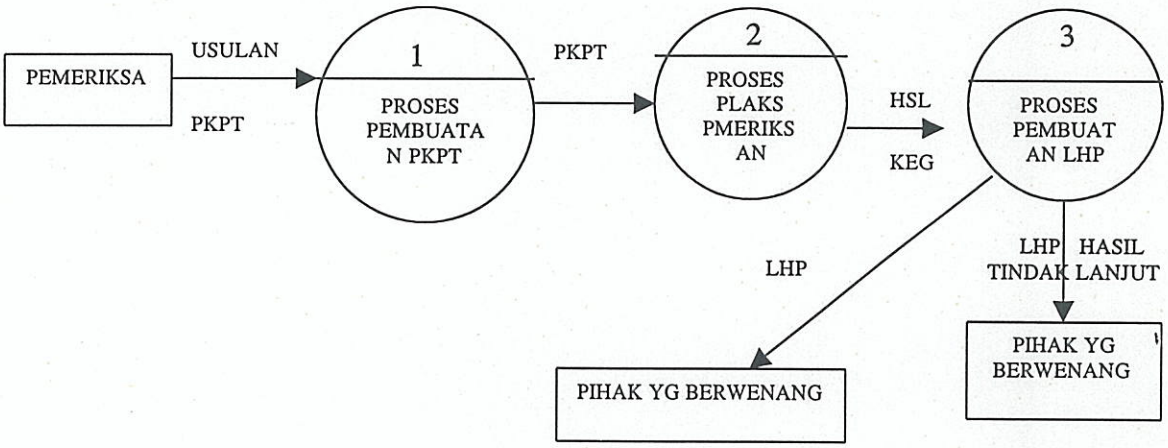
Sistem pengolahan data yang masih menggunakan cara manual mengurangi efektivitas dan efisiensi kerja karena data yang dihasilkan mungkin tidak maksimal. Adapun usulan penulis agar diadakan perubahan dari sistem manual kepada sistem komputer, sehingga informasi yang

dihasilkan lebih efektif dan efisien. Berikut usulan penulis tentang perancangan sistem komputerisasi:

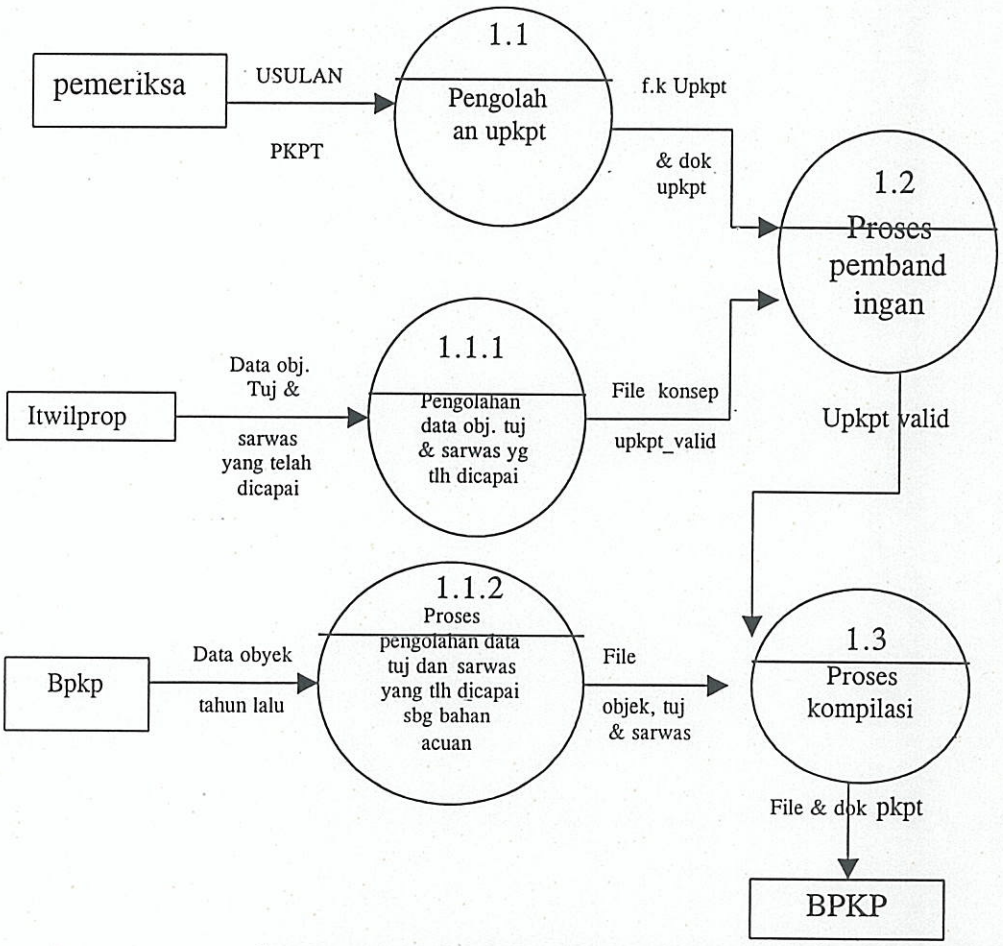




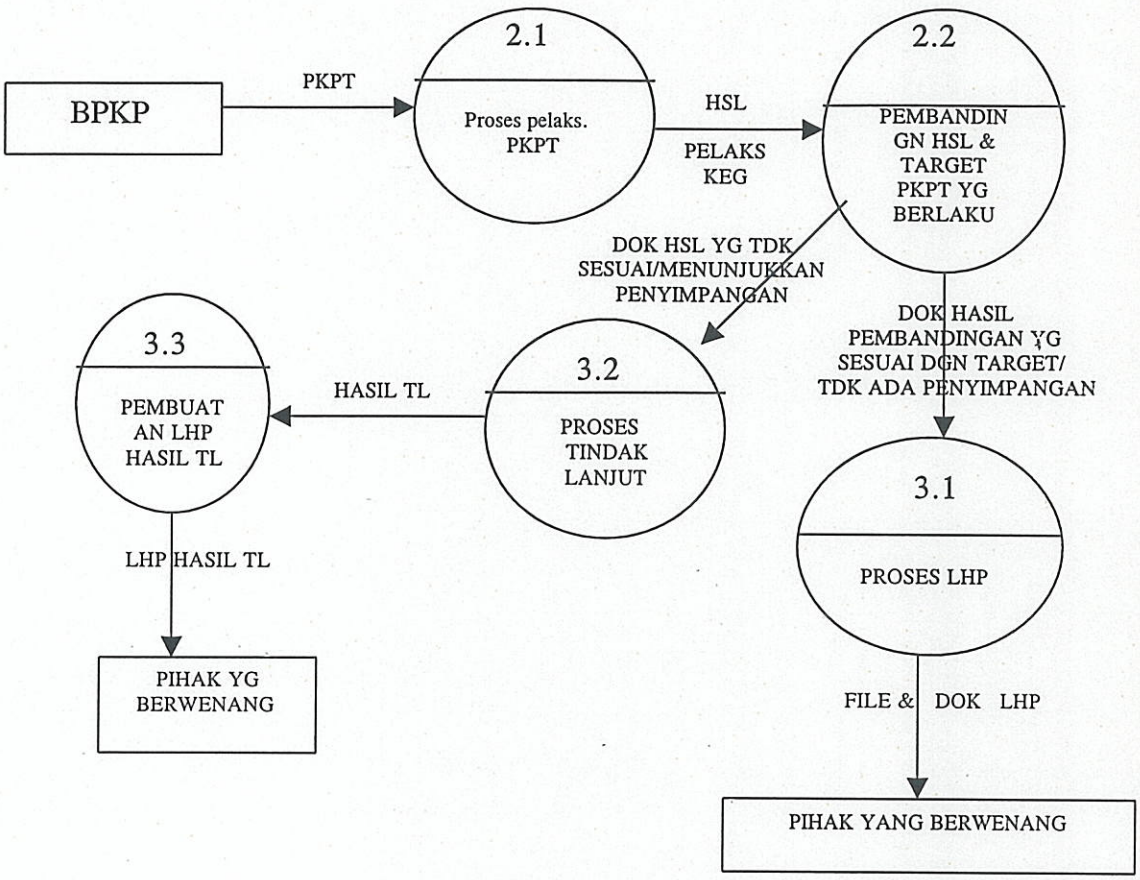
Gambar 4.1 Diagram Alir Dokumen PKPT Usulan



Gambar 4.2 DFD Level 0 Usulan



Gambar 4.3 DFD Usulan pembuatan PKPT level 1



Gambar 4.4 DFD level Usulan Pelaksanaan & Pembuatan LHP level 1

Keterangan : Pada bagian ini penulis mengusulkan beberapa perubahan terhadap sistem yang sedang berjalan saat ini, yaitu pada proses pembuatan PKPT dari manual ke sistem komputerisasi (untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada spesifikasi proses), dan pada proses pembuatan laporan hasil kegiatan, dimana jika pada sistem yang sedang berjalan ditemukan adanya penyimpangan Inspektorat wilayah tidak

Nama proses	Pengolahan data obj. tuj & sarwas yg telah dicapai
Input	Data obj. tuj & sarwas yang telah dicapai
Output	File konsep upkpt valid
Ilustrasi Itwilprop disini melakukan proses mengolah data objek tuj & sarwas yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya sebagai bahan acuan untuk program tahun yang akan datang	

No proses	1.1.2
Nama proses	Proses pengolahan data obj, tuj & sarwas yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya sebagai bahan acuan
Input	Data obyek tahun sebelumnya
Output	File objek, tuj & Sarwas
Ilustrasi Bpkp selaku APFP pusat khendaknya membuat semacam daftar file yang berisi objek, tuj & sarwas yang telah dicapai ataupun yang belum dicapai sebagai bahan acuan, untuk tahun - selanjutnya sehingga proses komputerisasi dari PKPT lebih efektif.	

No Proses	1.2

Nama Proses	Proses pembandingan
Input	File UPKPT & dok UPKPT dari para pemeriksa dan file UPKPT_valid dari ITWILPROP
Output	UPKPT_ valid
Ilustrasi Pada proses Upkpt dari para pemeriksa dibandingkan dengan Upkpt valid dari Itwilprop untuk memperoleh data perkiraan tentang obyek yang akan dimasukkan dalam PKPT	

No Proses	1.3
Nama Proses	Proses kompilasi
Input	UPKPT_Valid & File obj, tuj & sarwas
Output	FILE & Dokumen PKPT
Ilustrasi Pada proses ini, BPKP melakukan kompilasi atas UPKPT yang telah valid melalui sistem komputerisasi, ini dapat dilakukan jika BPKP mempunyai File yang berisi data daftar obyek dan tuj sarwas yang telah dicapai ataupun yang belum dicapai sehingga lebih memudahkan dalam menentukan target selanjutnya.	

No proses	2.1
Nama Peoses	Proses pelaksanaan PKPT
Input	PKPT
Output	Hasil pelaksanaan kegiatan

Ilustrasi BPKP yang telah menyetujui dan mengesahkan PKPT kemudian mendistribusikan PKPT tersebut ke tiap-tiap daerah untuk direalisasikan/dilaksanakan

No Proses	2.2
Nama Proses	Proses pembandingan hasil dengan PKPT yang telah ditargetkan
Input	Hasil pelaksanaan kegiatan
Output	Hasil pembandingan sesuai target
Ilustrasi Pada proses ini kita membandingakan hasil pelaksanaan kegiatan dengan yang ditargetkan , jika hasilnya sesuai dengan target maka dapat langsung menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan.	

No Proses	3.1
Nama Proses	Proses LHP
Input	Dok hasil pembandingan valid/sesuai
Output	Dok & file LHP
Ilustrasi Jika pada proses Pembandingan hasilnya sesuai target maka dapat langsung menjadi LHP	

No proses	3.2
Nama proses	Proses Tindak Lanjut terhadap penyimpangan
Input	Dok hasil pembandingan yang tidak sesuai/menunjukkan adanya penyimpanan
Output	Dok hasil tindak lanjut
Ilustrasi Jika pada proses pembandingan hasilnya tidak sesuai dengan yang ditargetkan, maka dilakukan proses tindak lanjut terhadap penyimpangan yang ada	

No Proses	3.3
Nama Proses	Proses Pembuatan LHP hasil Tindak Lanjut
Input	Dok Hasil Tindak Lanjut
Output	File & dokumen LHP hasil Tindak Lanjut
Ilustrasi: Pada proses ini dokumen hasil tindak lanjut diolah secara komputerisasi yang hasilnya berupa file dan dokumen LHP hasil tindak lanjut.	